

2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP).



**DINAS KOPERASI UKM,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemudahan yang Dia berikan kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelaksanaan lebih lanjut atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatalaksana Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Lampung Barat bertanggung jawab membantu Bupati dalam pelaksanaan tugas Pembangunan di sektor Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut beberapa kinerja utama yang telah dicapai antara lain presentase koperasi sehat yang terealisasi sebesar 33.3% dari target 30%, presentase pertumbuhan UMKM sebesar 29.2% dari target 10%, serta presentase produk UMKM yang memenuhi standar terealisasi 3% dari target 3% pada tahun 2023.

Sementara itu di sektor perdagangan dan perindustrian, capaian kinerja utama yaitu PDRB sektor perdagangan dan PDRB sektor perindustrian memiliki tingkat capaian realisasi masing – masing sebesar 130% dan 110% dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Lampung Barat melakukan kerjasama lintas fungsi antara lain dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait perizinan usaha mikro, Dinas lingkup Deptan dalam pengolahan komoditas

pertanian, perikanan, dan perkebunan, Dinas Kesehatan, BPSJI, Kementerian Agama terkait dengan pelayanan sertifikasi Halal bagi usaha mikro, serta pihak – pihak lainnya. Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor bentuk 4 tahun 2023, terjadi perubahan nomenklatur Dinas menjadi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

Laporan Kinerja ini kami susun sebagai pemenuhan kewajiban sebagai organisasi publik kepada masyarakat dan pihak – pihak terkait guna mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang telah ditetapkan pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan serta pertanggung jawaban kepada pimpinan atas kinerja yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Selanjutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam seluruh upaya mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan di tahun 2023, juga kami membuka ruang masukan yang konstruktif untuk perbaikan pencapaian kinerja dimasa yang akan datang.

Liwa, 15 Februari 2023

KEPALA DINAS
KOPERASI UKM, DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



TRI UMARYANI, S.P,M.Si.
NIP. 19751229 199902 2 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Sistem Akuntabilitas Kinerja dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran yang diberikan kepada Instansi tersebut. Selain itu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan program dalam rangka mencapai tujuan kinerja yang telah ditetapkan. Dalam kerangka akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai media pertanggung jawaban pemerintah selaku pemegang mandat kepada masyarakat selaku penerima manfaat pembangunan.

Capaian kinerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2023 merupakan tahun pertama capaian Rencana Strategis pada masa kekosongan Kepala Daerah, yakni periode 2023-2026. Target kinerja yang ditetapkan antara lain presentase koperasi sehat, persentase pertumbuhan UMKM, presentase produk UMKM memenuhi standar, PDRB sektor perdagangan dan PDRB sektor perindustrian, sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023.

Pada pelaksanaannya, Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat mengalami perubahan, namun perubahan tersebut tidak merubah substansi terkait target kinerja hanya ada penambahan pagu anggaran yang dianggap penting untuk mendukung pencapaian kinerja juga atas kebijakan Pemerintah Pusat yang mengharuskan terjadinya perubahan anggaran.

Strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan antara lain meningkatkan kualitas dan daya saing koperasi dan UMKM, melalui Peningkatan Pemberdayaan Usaha Koperasi, Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, Peningkatan Kualitas Produk UMKM, serta Peningkatan Wirausaha pemula.

Sementara itu di sektor perdagangan dan industri strategi yang dilakukan adalah meningkatkan kontribusi PDRB sektor Perdagangan dan Perindustrian melalui kebijakan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan, Stabilisasi Harga Kebutuhan Bahan Pokok, Barang Penting dan Komoditas, Optimalisasi tertib niaga dan perlindungan konsumen melalui peningkatan pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat UTTP, Peningkatan Penjualan Produk Koperasi dan UMKM, Penumbuhan dan pengembangan Industri Kecil Menengah dan Peningkatan Omset Industri Kecil Menengah

Secara umum, capaian kinerja atas sasaran kinerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung
Barat
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Presentase Koperasi Sehat	%	30	33.3	110
2	Persentase Peningkatan Jumlah UMKM	%	10	29.2	292%
3	Persentase Produk UMKM terstandarisasi	%	3	3	100
4	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan (dalam milyar)	Milyar rupiah	961.79	1.200,87	130
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri (dalam milyar)	Milyar rupiah	372.88	413,49	110

Pada Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mencapai target kinerja yang diperjanjikan, Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Lampung Barat memiliki anggaran belanja sebesar Rp.18.424.991.230,- dengan realisasi sebesar Rp.18.033.195.569,- Terkait dengan tingkat efisiensi penggunaan anggaran, secara umum sudah efisien, hanya ada satu capaian program yang tidak efisien dari 10 program yang dijalankan, dimana indikator capaian program ini adalah presentase wirausaha pemula, yang hanya terealisasi sebesar 28 persen dari target 0.75%. Faktor penghambat pencapaian program ini adalah tidak semua peserta yang dilatih untuk menjadi wirausaha mampu untuk menindaklanjuti hasil pelatihan menjadi wirausaha. Wirausaha pemula adalah mereka yang dilatih untuk menjadi wirausaha, berbeda dengan penambahan Jumlah UMKM terdata, tidak semua penambahan UMKM dalam data base adalah UMKM sebagai follow up hasil pelatihan wirausaha yang dilaksanakan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai kinerja sasaran perangkat daerah sebagaimana dijelaskan diatas ada banyak faktor yang mendukung maupun menghambat pencapaian kinerja, baik bersifat internal maupun eksternal. Faktor – faktor yang dimaksud antara lain regulasi, kondisi sumber daya manusia, kondisi ekonomi secara umum, kenaikan harga BBM yang mempengaruhi kenaikan harga komoditas, kemarau panjang yang sangat mempengaruhi kenaikan harga – harga bahan pokok, adanya alokasi Dana Alokasi Khusus baik fisik maupun non fisik yang cukup besar dari Pemerintah Pusat, hingga komitmen penguatan ekonomi pasca pemulihan ekonomi oleh Pemerintah Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai evaluasi pelaksanaan dan pencapaian target kinerja organisasi, sebagai bahan evaluasi kinerja pegawai, dan sebagai bahan masukan kepada pimpinan terkait kebijakan yang seharusnya diambil dalam upaya Pembangunan di Sektor Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	Vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Tugas dan Fungsi.....	2
C Struktur Organisasi.....	3
D Peran Strategis Perangkat Daerah.....	5
E Isu Strategis Perangkat Daerah	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A Rencana Strategis Perangkat Daerah	7
B Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan.....	12
C Target Kinerja 2023	23
BAB III KAPASITAS ORGANISASI	
A Analisis Sumber Daya Manusia.....	31
B Analisis Sarana dan Prasaranan.....	32
C Analisis DPA tahun 2023	35
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA	
A Capaian Kinerja	36
B Perbandingan Kinerja	50
C Realisasi Anggaran	51
E Pemanfaatan Laporan Kinerja	54
BAB V PENUTUP	
A Kesimpulan	55
B Faktor Pendukung Keberhasilan	56
C Permasalahan	56
D Rekomendasi Tindak Lanjut	56
LAMPIRAN	
RENCANA AKSI KINERJA	
PERJANJIAN KINERJA 2023 DAN PERUBAHANNYA	
DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBANGUNAN	

DAFTAR TABEL

Tabel Program dan Kegiatan Pembangunan tahun 2023	8
Tabel Kerangka Pendanaan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023	14
Tabel Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2023	24
Tabel Indikator Kinerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2023	25
Tabel Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023	35
Tabel Perbandingan capaian kinerja sasaran 1 dengan tahun sebelumnya	37
Tabel Capaian Kinerja Sasaran Kedua tahun 2023	41
Tabel Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya	42
Tabel Capaian Kinerja Sasaran Ketiga tahun 2023	45
Tabel Perbandingan Kinerja 1 dengan capaian kinerja tingkat provinsi	49
Tabel Perbandingan Kinerja 2 dan 3 dengan capaian kinerja provinsi dan nasional	50
Tabel Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dinas Koperindag tahun 2023	51

DAFTAR GRAFIK

Grafik Kondisi Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2023.....	32
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

DAFTAR DIAGRAM

Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	4
Kondisi Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2023	32
Peta Proses Bisnis Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.....	39
Peta Proses Bisnis Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro.....	40
Peta Proses Bisnis Penyusunan Basis Data Pelaku Usaha	41
Peta Proses Bisnis Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	43
Peta Proses Bisnis Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	44
Peta Proses Bisnis Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	44
Peta Proses Bisnis Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	47
Peta Proses Bisnis Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	48
Peta Proses Bisnis Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	48

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah wujud tanggung jawab dan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja secara periodik.

Sebagai upaya mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan selaku instansi yang diberi tanggung jawab membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pembangunan di bidang Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan dituntut untuk senantiasa melakukan perbaikan kinerja, yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas kinerja dan peran dinas untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Lampung Barat.

Dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, target capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh level pemerintahan di atasnya, baik pada level Provinsi maupun level Nasional.

Terwujudnya sebuah tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

B. Tugas dan Fungsi

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam bagian kedua pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua urusan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib diselenggarakan oleh Pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi 26 urusan, sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yang penentunya diserahkan kepada daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Tugas Perangkat Daerah Berkaitan dengan urusan wajib maka Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat menangani urusan koperasi sedangkan untuk urusan pilihan menangani urusan perindustrian dan perdagangan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten

Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 25 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai kedudukan dan tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 70 tahun 2021 sebagaimana telah dilakukan perubahan menjadi Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan, fungsi Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pasar sebagai berikut:

1. Perumusan kebijaksanaan di bidang koperasi usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas koperasi usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Selanjutnya Kepala Dinas dibantu oleh satu orang sekretaris yang membawahi satu orang Kasubbag

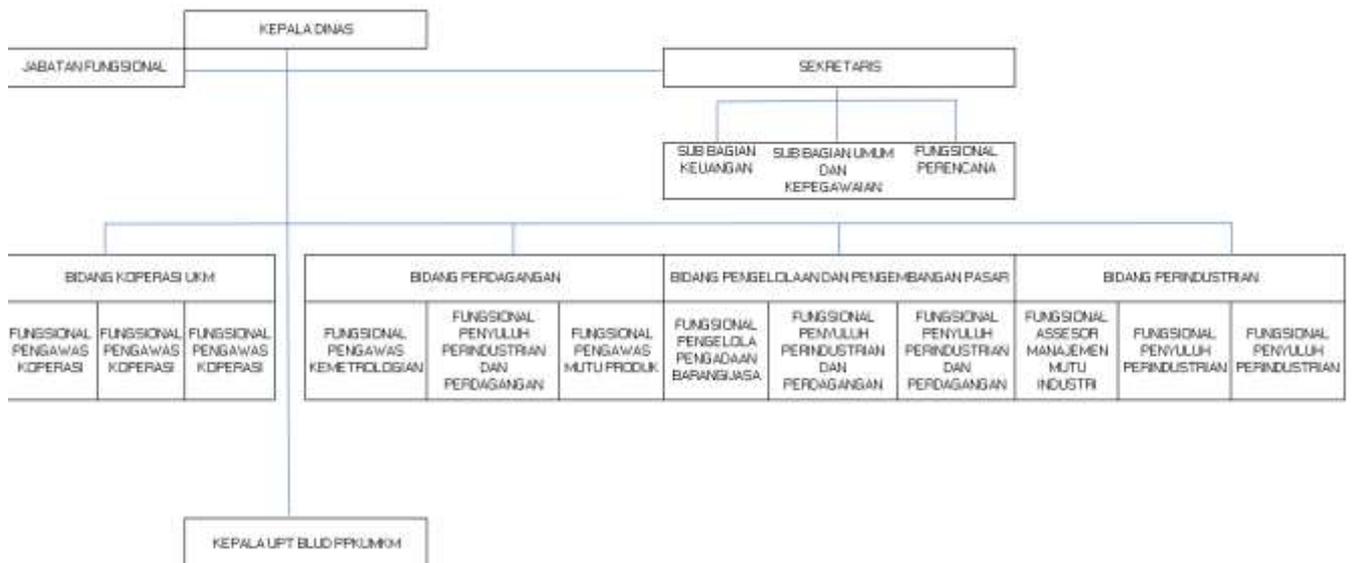
Umum dan Kepegawaian, satu orang Kasubbag Keuangan dan satu orang fungsional Perencana Ahli Muda.

Selanjutnya bidang teknis di Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan diuraikan sebagai berikut :

1. Bidang Koperasi UKM dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh tiga orang fungsional pengawas koperasi dan fungsional umum
2. Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang dan satu orang fungsional pengawas kemetrolagian, fungsional penyuluh Perindustrian dan perdagangan dan satu orang fungsional penjamin mutu produk.
3. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar dipimpin oleh seorang kepala kepala bidang dan dibantu oleh satu orang fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, dan dua orang Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan.
4. Bidang Perindustrian dipimpin oleh satu orang kepala bidang, dan dibantu oleh satu orang fungsional asesor mutu produk dan dua orang fungsional penyuluh industri.

Secara ringkas bisa dilihat dalam Bagan struktur organisasi berikut ini :

Bagan 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan



D. Peran Strategis Perangkat Daerah

Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat bertugas membantu Bupati dalam Pembangunan di sektor ekonomi, khususnya sektor Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan mendapatkan amanah kinerja mendukung peningkatan pendapatan perkapita Kabupaten Lampung Barat pada subsektor Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta sektor perdagangan dan industri.

Dalam mencapai tujuan strategis tersebut ditetapkan sasaran kinerja strategis Perangkat Daerah yakni Meningkatnya kualitas dan daya saing Koperasi dan UMKM dengan indikator kinerja Persentase koperasi sehat, persentase peningkatan jumlah UMKM dan Persentase produk UMKM terstandar.

Selanjutnya sasaran strategis kedua yang ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi adalah Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan dengan indikator kinerja PDRB Sektor Perdagangan dan Meningkatnya PDRB Sektor Industri dengan kinerja PDRB Sektor Industri.

E. Isu Strategis Perangkat Daerah

Beberapa hal yang menjadi isu strategis pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sektor Koperasi UKM

Rendahnya Daya saing usaha koperasi dan UKM rendah sehingga belum mampu mendorong penyediaan lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan masyarakat. Kuantitas koperasi dan UKM belum mampu menghadirkan usaha yang berkualitas secara ekonomi, baik skala usaha, omset maupun laba yang dihasilkan. Kondisi tersebut dapat menghambat upaya pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah yakni meningkatkan Pendapatan Perkapita.

2. Sektor Perindustrian dan Perdagangan

Rendahnya kontribusi sektor Perindustrian dan perdagangan terhadap PDRB yang menunjukkan bahwa sektor ini belum mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Lampung Barat pertumbuhannya masih didominasi oleh sektor pertanian dan Perkebunan yakni menyumbang sekitar 45% dari total PDRB Kabupaten Lampung Barat. Sementara produk pertanian haruslah memiliki nilai tambah untuk bisa meningkatkan pendapatan, tidak hanya dijual dalam bentuk komoditas mentah saja melainkan dalam bentuk produk olahan yang diyakini memiliki *value added*

BAB III

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Perangkat Daerah

1. Strategi dan Arah Kebijakan

- Urusan Koperasi UKM

Strategi yang disusun dalam mencapai sasaran kinerja Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM adalah Peningkatan kualitas dan daya saing Koperasi dan UMKM, melalui kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Pemberdayaan Usaha Koperasi
- b. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- c. Peningkatan Kualitas Produk UMKM
- d. Peningkatan Wirausaha pemula

- Urusan Perdagangan

Strategi yang disusun dalam mencapai sasaran kinerja Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan adalah melalui upaya peningkatan PDRB Sektor Perdagangan, melalui kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan.
- b. Stabilisasi Harga Kebutuhan Bahan Pokok, Barang Penting dan Komoditas
- c. Optimalisasi tertib niaga dan perlindungan konsumen melalui peningkatan pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat UTPP
- d. Peningkatan Penjualan Produk Koperasi dan UMKM

- Urusan Perindustrian

Strategi yang disusun dalam mencapai sasaran kinerja Meningkatnya PDRB Sektor Perindustrian adalah melalui upaya peningkatan PDRB Sektor Perindustrian, melalui kebijakan sebagai berikut:

- a. Penumbuhan dan pengembangan IKM
- b. Peningkatan omset IKM

2. Program dan Kegiatan Pembangunan Perangkat Daerah

Untuk mendukung strategi dan kebijakan yang telah dituangkan dalam rencana strategis Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat disusun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023, dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Program dan Kegiatan Pembangunan tahun 2023

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN
	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan

	Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan
	Jumlah Paket Barang cetakan cetakan dan penggandaan yang disediakan
	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan
	Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan tamu
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik
	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan usahanya
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persentase SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang peningkatan SHU mencapai 5%
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewirausahaan

keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM terfasilitasi
Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase wirausaha pemula
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase los, kios dan ruko yang direvitalisasi
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan
Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah kerjanya	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG	% rata - rata perubahan harga bahan kebutuhan pokok, dan barang penting

KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting Penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	% Alat UTTP tertera sah
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah Alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	% Produk Koperasi dan UMKM terfasilitasi penjualannya
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan IKM Lampung Barat
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industry
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat

B. Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Target kinerja berupa sasaran kinerja outcome, immediate outcome, maupun output yang telah ditetapkan dalam rencana strategis melalui pola penjenjangan kinerja melalui penentuan *Critical Strategic Factor (CSF)* selanjutnya diturunkan dibuat pohon kinerja dengan metode *logical frame work analysis*. Selanjutnya ditetapkan pohon kinerja, dituangkan dalam program kerja dan kegiatan dan disusunlah cascading kinerja yang menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja.

Perjanjian kinerja adalah komitmen tertulis antara Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati Lampung Barat terkait target yang harus dicapai sepanjang tahun 2023 yakni *outcome* yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah, komitmen antara Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat dibawahnya dalam hal ini setingkat Kepala Bidang masing – masing urusan yang diampu yakni berupa sasaran antara (*immediate outcome*), sampai kepada komitmen staf pelaksana dengan kepala bidang terkait output atau kinerja tataran operasional yang harus dicapai sepanjang tahun 2023.

Perjanjian Kinerja di Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2023 mengalami perubahan seiring dengan adanya perubahan Anggaran Belanja Pendapatan Daerah Tahun 2023, namun perubahan tersebut tidak merubah kinerja secara substantif hanya saja menambah jumlah anggaran yang akan dipertanggung jawabkan oleh masing – masing pejabat.

Secara lebih lanjut Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperindag tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA TINGKAT PERANGKAT DAERAH																								
Perangkat Daerah Tahun Anggaran		: DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : 2023																						
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET																					
(1)	(2)	(3)	(4)																					
1.	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi yang Sejahter	30%																					
		Persentase Peningkatan Jumlah UMKM	10%																					
		Persentase Produk UMKM yang memenuhi standarisasi	3%																					
2.	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	PDRB Sektor Perdagangan	Rp. 825.273 Milyar																					
3.	Meningkatnya PDRB Sektor Perindustrian	PDRB Sektor Industri	Rp. 372.88 Milyar																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Program</th> <th>Anggaran</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</td> <td>3.626.770.764</td> <td>APBD</td> </tr> <tr> <td>2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</td> <td>133.693.500</td> <td>APBD</td> </tr> <tr> <td>3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</td> <td>15.000.000</td> <td>APBD</td> </tr> <tr> <td>4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</td> <td>266.476.500</td> <td>APBD</td> </tr> <tr> <td>5. Program Pengembangan UMKM</td> <td>7.210.667.318</td> <td>APBD</td> </tr> <tr> <td>6. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</td> <td>81.261.000</td> <td>APBD</td> </tr> </tbody> </table>				Program	Anggaran	Keterangan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.626.770.764	APBD	2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	133.693.500	APBD	3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	15.000.000	APBD	4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	266.476.500	APBD	5. Program Pengembangan UMKM	7.210.667.318	APBD	6. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	81.261.000	APBD
Program	Anggaran	Keterangan																						
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.626.770.764	APBD																						
2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	133.693.500	APBD																						
3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	15.000.000	APBD																						
4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	266.476.500	APBD																						
5. Program Pengembangan UMKM	7.210.667.318	APBD																						
6. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	81.261.000	APBD																						

7	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	:	52.125.000	APBD
8	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	:	55.001.000	APBD
9	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	:	41.997.500	APBD
10	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	:	6.612.791.450	APBD
Jumlah Anggaran			16.116.204.032	

Liwa, Januari 2023

PJ. BUPATI LAMPUNG BARAT,



NUKMAN

KEPALA DINAS
KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,
TBI INAYANI, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19751229 1999 2 001

Selanjutnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja tersebut Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan menerima Anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Barat, dengan kerangka pendanaan sebagai berikut :

Tabel 2.2 Kerangka Pendanaan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan	Renja Murni	RKA	DPA Pengesahan	DPA Pergeseran	DPA Perubahan
A	Sasaran : Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi dan UMKM					
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.900.199.900	3.626.770.764	3.626.770.764		3.445.557.962
1	Kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.999.800	19.999.800	19.999.800	19.999.800	19.999.800

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.979.193.900	3.075.629.564	3.075.629.564	2.951.759.044	2.946.592.402
3.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	12.995.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	261.313.000	143.709.500	143.709.500	130.019.500	171.309.160
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87.138.860	0	0	0	0
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.856.800	165.770.300	165.770.300		147.370.300
8.	Pemeliharaan Barang Milik	211.075.500	179.086.500	179.086.500	118.211.500	118.211.500

	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
9.	Peningkatan Pelayanan BLUD	35.000.000	35.575.000	35.575.000		35.575.000
II	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	99.998.500	0	0		
1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	99.998.500	0	0		

III	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	221.779.500	133.893.500	133.893.500		133.893.500
1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	221.779.500	133.893.500	133.893.500		133.893.500
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	79.943.900	15.000.000	15.000.000		15.000.000
1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	79.943.900	15.000.000	15.000.000		15.000.000

V	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO	807.339.500	286.476.500	286.476.500		286.476.500
1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	807.339.500	286.476.500	286.476.500		286.476.500
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	7.868.621.810	7.210.887.318	7.210.887.318		7.210.887.318

1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	7.868.621.810	7.210.887.318	7.210.887.318		7.210.887.318
B	Sasaran 2 : Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan					
I	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	76.310.261.256	81.261.000	81.261.000		81.261.000
1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	76.148.466.256	0	0		225.000.000
2	Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	161.795.000	81.261.000	81.261.000		81.261.000

	masyarakat diwilayah kerjanya					
II	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	550.000.000	52.125.000	52.125.000		62.125.000
1	Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	438.575.000	0	0		0
2	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	111.425.000	52.125.000	52.125.000		52.125.000
III	PROGRAM STANDARISASI DAN	238.500.000	55.001.000	55.001.000		55.001.000

	PERLINDUNGAN KONSUMEN					
1	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	238.500.000	55.001.000	55.001.000		55.001.000
IV	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	373.070.000	41.997.500	41.997.500		71.997.500
1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	373.070.000	41.997.500	41.997.500		71.997.500
C	Sasaran : Meningkatnya PDRB Sektor Industri					

I	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	6.125.000.000	6.612.791.450	6.612.791.450	6.687.791.450	6.837.791.450
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	6.125.000.000	6.612.791.450	6.612.791.450	6.687.791.450	6.687.791.450
	TOTAL	97.139.115.400	18.116.204.032	18.116.204.032	17.992.268.212	18.424.991.230

C. Target Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan Rencana Strategis yang telah ditetapkan maka target kinerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2023

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi	Target	Sumber data
1.	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi dan UMKM	% Koperasi yang Sehat	\sum Koperasi sehat / \sum Koperasi x 100%	30%	Pendataan dan penilaian dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM, perindustrian dan perdagangan
		Persentase Peningkatan Jumlah UMKM	Nilai Akhir – Nilai Awal / Nilai Awal x 100%	10%	Hasil Pembinaan dan pendataan
		% Produk UMKM yang memenuhi standarisasi	\sum produk yang memiliki standarisasi perijinan dan sertifikasi / \sum produk x 100%.	3%	Hasil Pembinaan
2.	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	PDRB Sektor Perdagangan	Data BPS	887.43 Milyar rupiah	Data BPS

3.	Meningkatnya PDRB Sektor Industri	PDRB Sektor Industri	Data BPS	358.37 Milyar rupiah	Data BPS
----	-----------------------------------------	-------------------------	----------	----------------------------	----------

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2023

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi	Target kinerja
A	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi dan UMKM	% Koperasi yang Sehat	$\frac{\sum \text{Koperasi sehat}}{\sum \text{Koperasi}} \times 100\%$	30%
		Persentase Peningkatan Jumlah UMKM	$\frac{\text{Nilai Akhir} - \text{Nilai Awal}}{\text{Nilai Awal}} \times 100\%$	10%
		% Produk UMKM yang memenuhi standarisasi	$\frac{\sum \text{produk yang memiliki standarisasi perijinan dan sertifikasi}}{\sum \text{produk}} \times 100\%$	3%
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai Sakip OPD	Nilai sakip hasil review inspektorat	77.93 poin
2	Meningkatnya kualitas manjerial koperasi	Persentase koperasi yang menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan usahanya	$\frac{\sum \text{Koperasi yang menggunakan sistem komputerisasi dalam pembukuan usaha}}{\sum \text{Koperasi}} \times 100\%$	2%
a.	Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persentase SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	Hasil evaluasi pelatihan pengurus koperasi dan hasil evaluasi manajerial koperasi	4.04%

3	Meningkatnya Kesejahteraan anggota koperasi	Persentase Koperasi yang peningkatan SHU mencapai 5%	Σ Koperasi yang mengalami peningkatan SHU minimal 5% per tahun / Σ jumlah koperasi x 100	9%
a.	Terlaksananya pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewirausahaan	Σ pelaku UMKM dan pelaku usaha koperasi yang memiliki pengetahuan manajemen usaha dan mengalami peningkatan omset	45 orang
4	Meningkatnya Kualitas Produk UMKM	Persentase UMKM terfasilitasi	Σ (UMKM yang difasilitasi perizinan, sertifikasi dan pembinaan) + (UMKM yang difasilitasi Pembiayaan) / Σ UMKM x 100%	3%
		Persentase wirausaha pemula	Σ UMKM baru hasil pelatihan / Σ UMKM x 100%	0.75%
a.	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	Jumlah SDM yang dilatih dan menjadi wirausaha pemula	80 orang

5.	Meningkatnya Kualitas daya saing UMKM	Persentase wirausaha pemula	\sum UMKM baru hasil pelatihan / \sum UMKM x 100%	0.25%
a.	Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha mikro yang terfasilitasi	500 unit usaha
B.	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	PDRB Sektor Perdagangan	Data BPS	887.43 Milyar rupiah
1	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan	Persentase los, kios dan ruko yang direvitalisasi	\sum Pasar direvitalisasi / \sum seluruh pasar x 100%	20%
a.	Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	Jumlah unit kios, los dibangun/direvitalisasi	1 unit
b.	Terlaksananya Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah kerjanya	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola	Jumlah dokumen	1 dokumen

		sarana distribusi perdagangan		
2	Meningkatnya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok, dan Barang Penting	% rata - rata harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting	persentase rata - rata kenaikan atau penurunan harga kebutuhan pokok, dan barang penting selama setahun	3%
a	Terlaksananya pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting Penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah dokumen laporan hasil pengawasan	1 dokumen
3	Meningkatnya Tertib Niaga dan Perlindungan Konsumen	% Alat UTTP Tertera sah	$\frac{\sum \text{Alat UTTP Tertera sah}}{\sum \text{data UTTP}} \times 100\%$	3.9%
a.	Terlaksananya kegiatan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan	Jumlah Alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat	dokumen data UTTP	185 unit

		perlengkapan ditera ulang		
4	Meningkatnya Penjualan Produk Koperasi dan UMKM	Persentase Produk Koperasi dan UMKM terfasilitasi penjualannya	Σ produk yang difasilitasi penjualan / Σ produk x 100%	4.4%
a.	Terlaksananya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang difasilitasi ke pasar retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	15 UMKM
C	Meningkatnya PDRB Sektor Industri	PDRB Sektor Industri	Data BPS	358.37 Milyar rupiah
1.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Omset IKM	Persentase Pertumbuhan IKM Lampung Barat	Σ IKM tahun berjalan - Σ IKM tahun sebelumnya / Σ IKM tahun sebelumnya x 100%	4%
		Persentase IKM yang memiliki kenaikan omset 10% pertahun	Σ IKM dengan kenaikan omset minimal 10% / Σ IKM x 100%	2%
a.	Telaksananya Penyusunan dan evaluasi Rencana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	Jumlah dokumen hasil koordinasi	1 dokumen

	Pemabngunan Industri Kabupaten/Kota	Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi	1 dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi	1 dokumen

BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

A. Analisis Sumber Daya Manusia

Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat termasuk dalam klasifikasi OPD yang tipe A yang mengurus urusan Wajib dan Urusan Pilihan, dibawah naungan 3 (tiga) Kementerian yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. Sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor : 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Koperindag mempunyai 4 Bidang, 1 Sekretariat dan UPTD PP KUKM (Perkuatan Permodalan Koperasi Usaha Kecil Menengah). Dengan beban kerja yang cukup banyak, diperlukannya Sumber Daya Manusia yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

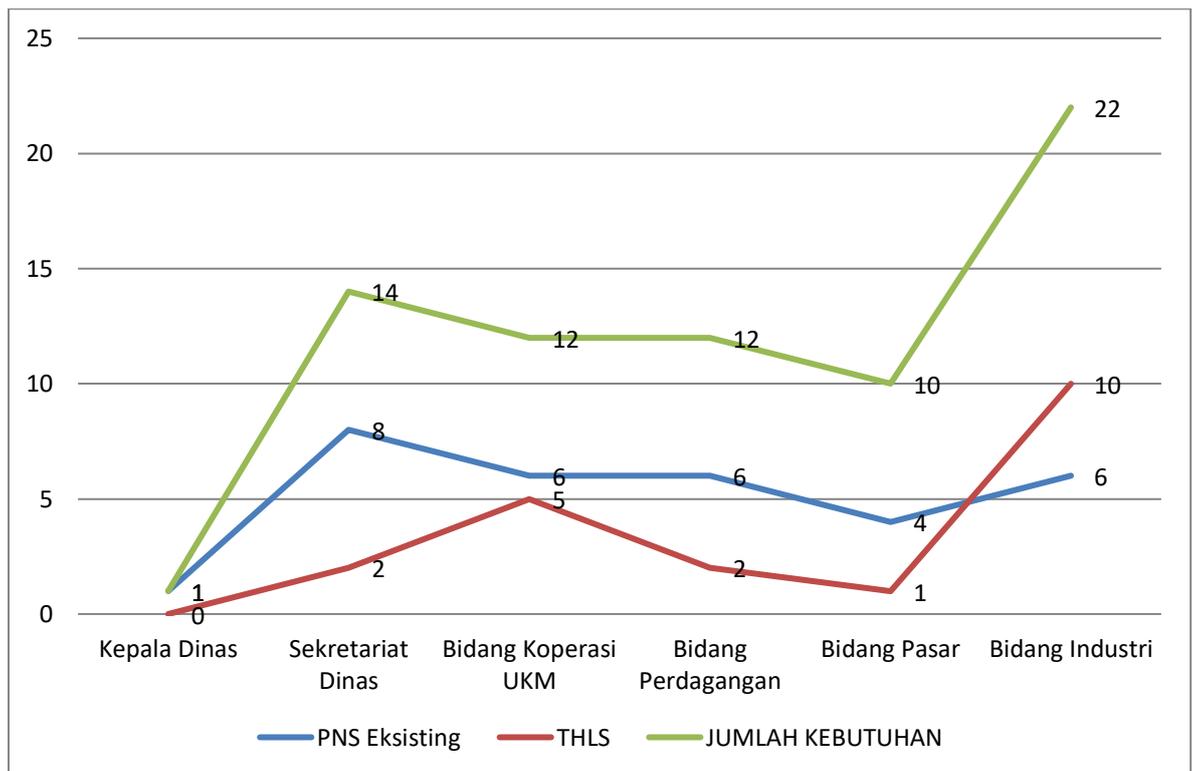
Jumlah sumber daya manusia sebanyak 48 orang terdiri dari 31 orang ASN ditambah dengan 20 tenaga kontrak dan THLS. Dari 31 orang tersebut terdiri dari 1 orang kepala dinas, 1 orang sekretaris, 4 orang kepala bidang, 4 orang eselon IV dan 13 orang pejabat fungsional. Seyogyanya setiap bidang memiliki minimal 5 atau 6 orang staf. Jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak 73 orang, artinya Dinas Koperindag kekurangan staf sebanyak 25 orang. Akan tetapi kekurangan tersebut didukung oleh tenaga kontrak dan THLS sebanyak 20 orang, sehingga masih terdapat kekurangan 5 orang pegawai.

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor penting demi keberlangsungan sebuah Program Pembangunan. Kebutuhan pegawai suatu instansi mutlak diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai yang tepat, baik jumlah waktu maupun kualitas. Faktor keberhasilan capaian kinerja di Dinas Koperindag Kabupaten Lampung Barat adalah mengutamakan kerjasama tim. Dalam pelaksanaan setiap

program kegiatan di Dinas Koperindag dilaksanakan oleh sebuah tim yang telah dibentuk berdasarkan rekomendasi pimpinan.

Secara ringkas data kebutuhan dan ketersediaan aparatur pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat digambarkan dalam gambar berikut :

Gambar 3.1 Grafik Kondisi Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2023



B. Analisis Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan hal penting dalam menunjang pencapaian kinerja, oleh karena itu sarana dan prasaranan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian Kabupaten Lampung Barat memiliki asset yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.1 Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Cukup	Rusak
1	Meja Biro	6	6	0	0
2	Meja 1/2 Biro	53	53	0	0
3	Kursi Biro	4	4	0	0
4	Kursi 1/2 Biro	10	10	0	0
5	Kursi Staff Lipat	56	56	0	0
6	Faxcimile	1	1	0	0
7	Komputer	2	2	0	0
8	Komputer PC	2	2	0	0
9	Almari/rak arsip	2	2	0	0
10	Filling Cabinet	8	8	0	0
11	Brankas	2	2	0	0
12	Telepon	1	1	0	0
13	Lemari kayu	6	6	0	0
14	Kamera Digital	1	1	0	0
15	Laptop	6	5	0	0
16	Printer	5	5	0	0
17	Stavol	1	1	0	0
18	UPS	1	1	0	0
19	Meja tamu	4	4	0	0
20	LCD	2	2	0	0
21	Komputer BLUD	1	1	0	0
22	Laptop BLUD	2	2	0	0
23	Printer BLUD	2	2	0	0
24	Meja Produksi	10	10	0	0

39	Anak Timbangan kelas M2 Kap. 5 kg	2	2	0	0
40	Anak timbangan keals M2 Kap. 10 kg	2	2	0	0
41	Anak Timbangan kelas M2 Kap. 20	2	2	0	0
42	kg	1	1	0	0
43	Alat Uji Dacin	25	25	0	0
44	Anak Timbangan Bidur M2 Kap. 20	1	1	0	0
45	kg	1	1	0	0
46	Termometer digital 100'/c 0, 1'c				
47	Anak Timbangan Remidi (kelas M2	1	1	0	0
48	Kap.1g-1kg				
49	Anak Timbangan Miligram kelas M1 (1	1	1	0	0
50	mg- 500 mg)	1	1	0	0
51	Termohyrometer	2	2	0	0
52	Dehumidifier	1	1	0	0
53	Air Cinditioner	1	0	1	0
54	Mobil Toyota Rush	1	0	1	0
55	Mobil Daihatsu Taruna	1	0	0	0
56	Toyota Kijang,	1		1	0
57	Mobil Isuzu Elp/Mobil Metrologi	2		2	0
58	Motor Honda Win	1		1	0
59	Suzuki Shogun	1		1	0
60	Suzuki RC. 100				
61	Motor Honda Beat				

Sumber : Pengelola Barang Dinas Koperindag ; 2023

Ketersediaan sarana dan prasarana diatas belum mampu mengakomodir semua kebutuhan yang menunjang pencapaian kinerja pegawai. Idealnya satu pegawai memiliki satu perangkat elektronik baik itu Personal Computer maupun Laptop, namun saat ini dengan kondisi struktur yang ada kondisi ideal tersebut belum bisa terpenuhi.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan telah diterapkan penerapan teknologi informasi baik dari sisi

perencanaan, pengelolaan keuangan maupun proses pelayanan. Dalam pelaksanaan perencanaan Pembangunan dan pengelolaan keuangan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah Republik Indonesia, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menggunakan aplikasi LPSE atau pengadaan berbasis elektronik. Selain itu, pemanfaatan aplikasi OSS, sertifikasi dan perijinan online lainnya juga diterapkan dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi di perangkat daerah ini.

C. Analisis Dokumen Anggaran

Tabel 3.2 Struktur Dokumen Anggaran Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2023

No	Uraian	DPA murni 2023	DPA Perubahan 2023	Alasan Perubahan
1	Belanja Pegawai	3.108.649.864	2.972.112.402	Penyesuaian gaji dan tunjangan pegawai
2	Belanja Barang Dan Jasa	5.324.418.550	5.533.433.550	Penambahan jasa konsultasi persiapan program DAK Fisik Perdagangan tahun 2024
3	Belanja Hibah	185.000.000	420.000.000	Penambahan hibah pada organisasi pendukung kinerja dinas
4	Belanja Modal	9.498.135.618	9.499.445.278	Pembelian router internet
	TOTAL	18.116.204.032	18.424.991.230	

Sumber : Dokumen Anggaran Dinas Koperindag ; 2023

BAB IV
AKUNTABILITAS

A. Capaian Kinerja tahun 2023

1. **Sasaran pertama** : Meningkatnya kualitas dan daya saing koperasi dan UKM

Pencapaian kinerja sasaran pertama Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

tabel 4.1 Capaian Kinerja Sasaran Pertama tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi dan UMKM	% Koperasi yang Sehat	30%	33.3%	111%
		Persentase Peningkatan Jumlah UMKM	10%	29.2%	292%
		% Produk UMKM yang memenuhi standarisasi	3%	3%	100%

Sumber : Evaluasi Kinerja Dinas Koperindag ; 2023

Tabel 4.2 Perbandingan capaian kinerja sasaran 1 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2021	Realisasi kinerja 2022	Realisasi kinerja 2023
1	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi dan UMKM	% Koperasi yang Sehat	29.03%	32.2%	33.3%
		Persentase Peningkatan Jumlah UMKM	67.4%	11%	29.2%
		% Produk UMKM yang memenuhi standarisasi	0%	0%	3%

Sumber : Evaluasi Kinerja Dinas Koperindag ; 2023

Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja sasaran pertama yakni persentase koperasi sehat, persentase peningkatan jumlah UMKM dan Persentase Produk UMKM yang memenuhi standar secara umum mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat. Khusus indikator kinerja Persentase Produk UMKM yang memenuhi standarisasi adalah indikator yang baru ditetapkan dalam periode Renstra tahun 2023 – 2026, dimana dalam periode sebelumnya indikator ini belum ditetapkan sebagai indikator kinerja utama Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

- **Faktor penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja**

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian kinerja pada sasaran pertama adalah

1. Dukungan Dana Alokasi Khusus Non Fisik PK2UMK dan juga DAK Non Fisik Bidang Perindustrian yang menargetkan pelaksanaan kegiatan pendampingan usaha bagi UMKM khususnya fasilitasi sertifikasi Halal,

Fasilitasi Tingkat Komponen Dalam Negeri, juga pelatihan – pelatihan vocational maupun pelatihan manajerial pengelolaan usaha.

2. Tambahkan tenaga aparatur pendamping melalui kebijakan pendamping PK2UMK dari Kementrian Koperasi dan UKM melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik PK2UMK Tahun 2023 membuat kinerja pendampingan pelaku usaha mengalami peningkatan kualitas
3. Optimalnya kinerja aparatur pembina dan pengawas koperasi dalam menjalankan pembinaan terhadap sumber daya koperasi, selain itu optimalnya kinerja petugas pendamping lapangan bagi koperasi juga sangat mempengaruhi pencapaian kinerja sasaran
4. Faktor eksternal juga mempengaruhi capaian koperasi, kebijakan pemerintah pusat terkait tagline “*untung bareng koperasi*” serta aplikasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga kesadaran masyarakat tentang urgensi mengelola usaha koperasi menjadi pendukung ketercapaian kinerja.
5. Pendataan Pelaku Usaha yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik juga menyumbang data kinerja yang sangat signifikan disamping data hasil pembinaan lapangan. Hanya saja data Pelaku UMKM yang disajikan oleh BPS adalah data diolah, sehingga menyulitkan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam melakukan inventarisir data dimaksud untuk kegunaan analisis pemanfaatan data.
6. Adanya dukungan Kinerja Instansi terkait, seperti dukungan program Kredit bagi Koperasi dan UMKM yang dilaksanakan oleh Bank Penyalur KUR dan koordinasi dari bagian Perekonomian Setdakab Lampung Barat
7. Dukungan Dinas PTSP dalam fasilitasi perizinan usaha melalui aplikasi OSS dan optimalisasi pendampingan oleh tenaga pendamping lapangan kepada pelaku usaha

- **Faktor Penghambat Capaian Kinerja**

1. Sulitnya proses pembubaran terhadap 74 koperasi yang sudah tidak aktif secara kelembagaan maupun usaha sejak tahun 2020, hingga saat ini koperasi tersebut belum dibubarkan karena berkaitan dengan regulasi atas aset yang dimiliki koperasi.
2. Terbitnya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam, yang mengatur tentang koperasi simpan pinjam, yang mewajibkan koperasi Simpan Pinjam harus melakukan *self declair* yaitu pernyataan mandiri koperasi terkait dengan pilihan sistem usahanya yakni simpan pinjam terbuka atau tertutup. Regulasi ini merupakan tantangan dan dinamika sendiri mengingat persyaratan *self declare* diatas cukup kompleks.
3. Banyaknya UMKM yang tumbuh merupakan sebuah kondisi yang positif, namun terbatasnya sumber daya manusia maupun anggaran membuat belum maksimalnya capaian pembinaan yang dilakukan, atau dengan kata lain pembinaan belum bisa mencakup semua UMKM.

- **Gambaran Peta Proses Bisnis Pendukung Capaian Kinerja Utama**

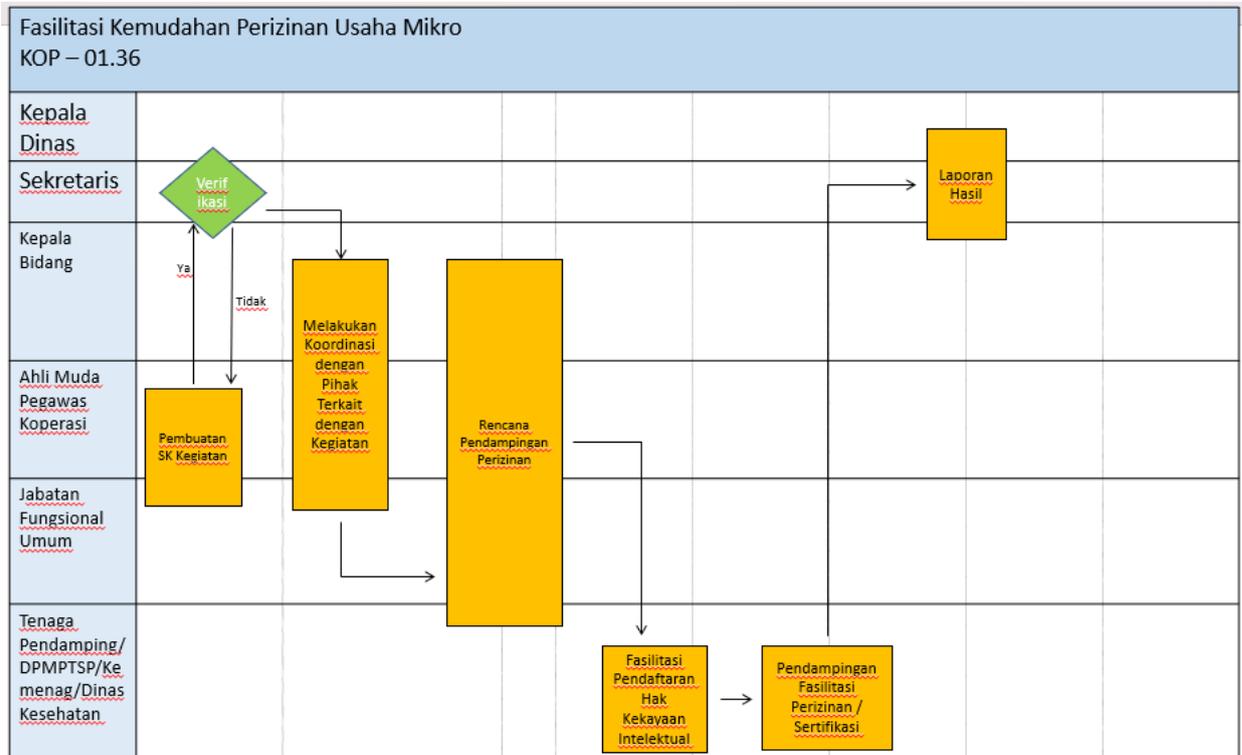
1. Peta Proses Bisnis Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi



Berdasarkan peta proses bisnis diatas terlihat bahwa dalam menjalankan kegiatan tingkat operasional untuk mencapai sasaran kinerja utama yakni

persentase koperasi sehat, dilaksanakan kegiatan peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi, dimana kegiatan ini melibatkan pihak diluar perangkat daerah yakni Pendamping Koperasi yang merupakan mitra Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang berasal dari penugasan Kementerian Koperasi UKM.

2. Peta Proses Bisnis Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro



Dalam peta proses bisnis diatas, menunjukkan bahwa dalam mencapai sasaran kegiatan yakni persentase produk UMKM terstandar dan persentase peningkatan jumlah UMKM dilaksanakan kegiatan pendampingan perizinan bagi usaha mikro, yang melibatkan banyak pihak selain aparatur perangkat daerah. Pihak yang terlibat tersebut antara lain Dinas PTSP, Kementerian Agama dan juga Dinas Kesehatan. Pihak – pihak ini bersifat koordinatif dalam mendukung pelaksanaan fasilitasi perizinan dan sertifikasi.

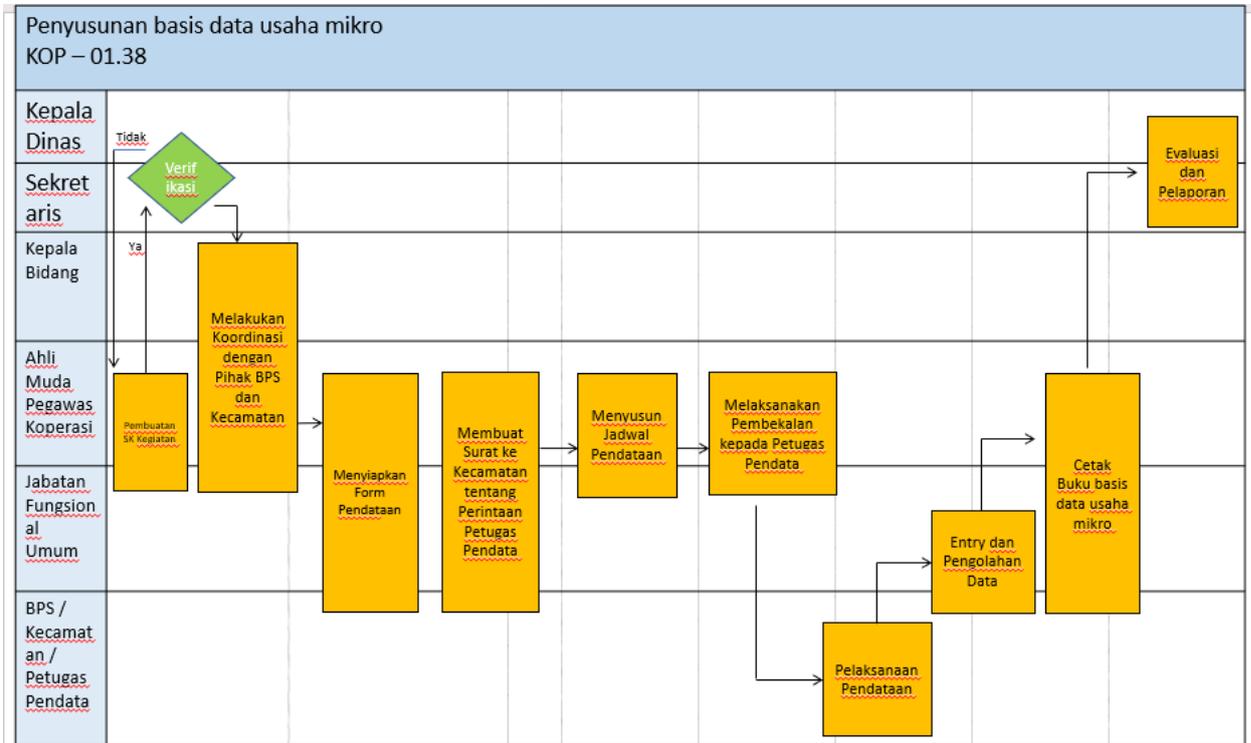
3. Peta Proses Bisnis Penyusunan Basis Data Pelaku Usaha

Dalam pelaksanaan penyusunan basis data pelaku usaha UMKM tahun 2023, tidak tersedia anggaran khusus, oleh karenanya data yang diambil dan

dimanfaatkan adalah data yang bersumber dari pendampingan dan Data Sensus Pelaku Usaha yang dilaksanakan oleh BPS pada tahun 2023 lalu.

Secara ringkas peran BPS dapat dilihat pada peta proses bisnis berikut :

Peta Proses Bisnis Penyusunan Basis Data Pelaku Usaha



2. Sasaran kedua

Pencapaian kinerja sasaran kedua Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

tabel 4.3 Capaian Kinerja Sasaran Kedua tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	PDRB Sektor Perdagangan	923.27 Milyar rupiah	1.200.87 Milyar rupiah	130%

Sumber : BPS Lampung Barat ; 2023

Target kinerja sasaran kedua adalah PDRB Sektor Perdagangan, dimana target ini disusun berdasarkan trend data *eksisting* pada tahun penyusunan Renstra pada tahun 2022 yakni menggunakan data BPS tahun 2021 sebagai dasar perhitungan target. Kondisi ekonomi Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2021 merupakan kondisi pandemi covid 19 sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat sempat mengalami kontraksi pertumbuhan. Pada tahun 2022 dan 2023 merupakan tahun pemulihan dan penguatan kembali ekonomi daerah pasca bencana non alam tersebut, sehingga kenaikan PDRB sektor perdagangan yang cukup tinggi yang menyebabkan realisasi kinerja sasaran ini mencapai 135.3%.

Tabel 4.4 Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2021	Realisasi kinerja 2022	Realisasi kinerja 2023
1	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	PDRB Sektor Perdagangan	961.79	1.200	1.200.87

Sumber : BPS Lampung Barat ; 2023

Tabel diatas merupakan gambaran perbandingan capaian sasaran kinerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat dalam 2 tahun terakhir. Dari data nampak trend positif pertumbuhan ekonomi Lampung Barat dari sektor perdagangan. Beberapa analisis keberhasilan dan tantangan pencapaian kinerja diuraikan dalam sub bab berikutnya

- **Faktor pendukung pencapaian kinerja**

Pencapaian indikator kinerja sasaran ke 2 Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat sudah mencapai diatas 100% dengan tingkat pencapaian 135.3%. Pencapaian ini dipengaruhi faktor – faktor berikut :

- a. PDRB sektor perdagangan adalah perhitungan dan analisis ekonomi secara makro yang dipengaruhi banyak faktor, dan sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi nasional dan skala wilayah provinsi dalam hal ini provinsi lampung, yang bukan hanya dari sisi pengeluaran masyarakat namun juga sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat secara umum
- b. Adanya penjualan produk UMKM dan juga komoditas keluar daerah Kabupaten Lampung Barat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan.
- c. Upaya penguatan ekonomi daerah yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagai lanjutan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid 19 berdampak pada bergeliatnya kembali kegiatan ekonomi masyarakat, menaikkan konsumsi tingkat rumah tangga.

- Faktor penghambat pencapaian kinerja

Dalam mencapai sebuah target kinerja, tentu ada hal – hal yang menjadi penghambat capaian. Dalam mencapai kinerja sasaran kedua ini faktor eksternal adalah hal yang paling menghambat, mengingat kondisi yang dicapai adalah kondisi makro ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal terutama iklim usaha perdagangan, kondisi distribusi barang dan jasa, ada juga faktor kenaikan bahan bakar minyak, kondisi alam seperti kemarau Panjang dan lain sebagainya

- **Gambaran Peta Proses Bisnis Pendukung Capaian Kinerja Utama**

1. Peta Proses Bisnis Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan



Dalam pelaksanaan kegiatan untuk menunjang kinerja utama pada kegiatan penyediaan sarana distribusi perdagangan terlihat bahwa ada peran Pejabat Pengadaan pada bagian ULP Setdakab Lampung Barat, dimana bagian tersebut berperan sangat penting dalam proses pengadaan barang dan jasa didalam pengadaan Pembangunan sarana distribusi perdagangan. Selain itu, pihak ketiga dalam hal ini pihak penyedia bertanggung jawab dalam membantu penyediaan sarana prasarana perdagangan.

2. Peta Proses Bisnis Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan



Dalam peta proses bisnis diatas, peran tim TPID menjadi sangat penting, sebagai pembuat kebijakan pengendalian inflasi, jika terjadi kenaikan harga bahan pokok dan barang penting yang tinggi. Selain itu peran Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perdagangan juga sangat krusial dalam upaya pengendalian harga bahan pokok masyarakat, laporan harian perkembangan harga bahan pokok akan langsung diinput dalam sistem pelaporan online dan terkini untuk dilakukan pemantauan dan analisis terkait kondisi harga – harga barang kebutuhan pokok di daerah.

3. Peta Proses Bisnis Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota



Dalam proses bisnis pemasaran penggunaan produk dalam negeri yang perangkat daerah bekerjasama dengan pihak pelaku usaha maupun kelompok pelaku usaha, serta yang memiliki peran penting adalah para buyer yang bekerjasama dalam memasarkan produk Koperasi dan UMKM di Kabupaten Lampung Barat.

3. Sasaran ketiga

Pencapaian kinerja sasaran ketiga Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

tabel 4.5 Capaian Kinerja Sasaran Ketiga tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Meningkatnya PDRB Sektor Industri	PDRB Sektor Industri	372.88 Milyar rupiah	413.49 Milyar rupiah	110%

Sumber : BPS Lampung Barat ; 2023

Sebagaimana PDRB sektor perdagangan, PDRB sektor industry merupakan salah satu indikator dalam mengukur kemajuan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dibidang industri. Meskipun Kabupaten Lampung Barat belum memiliki usaha industri dengan skala menengah hingga besar, namun sektor ini terus bergerak positif, hingga mampu memberikan kontribusi mencapai 4.9%-5% dari total PDRB Kabupaten Lampung Barat, menempati urutan ketiga setelah sektor pertanian dan sektor perdagangan.

Pada tahun 2023, capaian PDRB sektor ini mencapai 413.49 Milyar rupiah atau tercapai sebesar 110% dari target yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja.

Berikut diuraikan faktor yang mendukung pencapaian kinerja dan faktor yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan di sektor industri

- Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja
 - a. PDRB sektor industri adalah perhitungan dan analisis ekonomi secara makro yang dipengaruhi banyak faktor, dan sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi nasional dan skala wilayah provinsi dalam hal ini provinsi Lampung, diantaranya penjualan dan omset pelaku usaha sektor industri, dalam hal ini sektor industri kecil menengah
 - b. Pertumbuhan IKM sebesar 13.4% pada tahun 2023 serta kenaikan omset minimal 10% pada 2% IKM terbina ikut berperan menaikkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Lampung Barat. Pertumbuhan IKM disertai dengan peningkatan produktivitas dan penjualan produk IKM yang menjadi faktor penunjang utama penghitungan nilai tambah yang menjadi salah satu dasar perhitungan nilai PDRB sektor industri.
 - c. Alokasi Dana DAK Non Fisik Bidang Industri yang memberikan ruang untuk meningkatkan pembinaan terhadap pelaku Usaha Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Lampung Barat baik dari sisi penambahan modal produksi, fasilitasi sertifikasi produk serta penguatan Sentra IKM di Kabupaten Lampung Barat.
 - d. Gerakan Bela Beli Produk UMKM yang diprogramkan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, yakni mendorong semua pihak memilih produk olahan IKM Lampung Barat sebagai pilihan belanja, mendorong peningkatan produktivitas IKM.

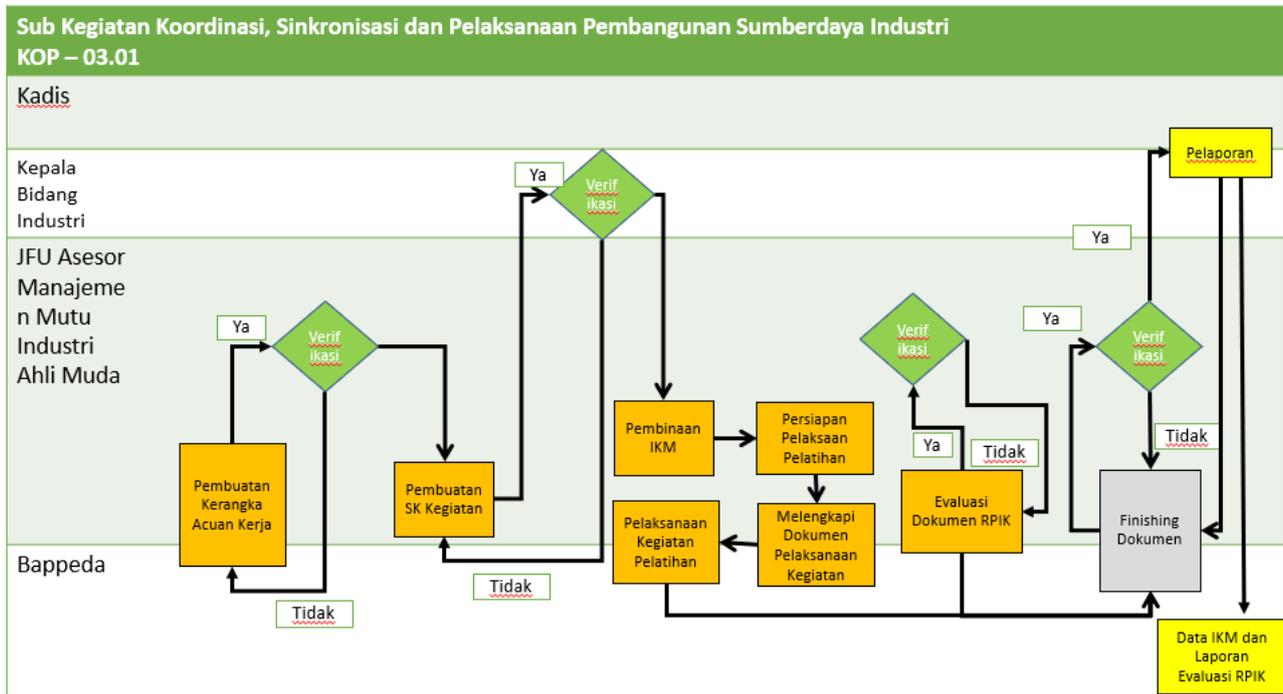
- Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja disektor industri, terdapat hambatan yang dialami oleh Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Faktor yang paling banyak menghambat adalah faktor eksternal pelaku IKM yang menjadi target binaan, yakni sikap mental pelaku usaha yang masih belum adaptif terhadap perkembangan dan dinamisasi zaman, serta sikap mental untuk selalu diberi bantuan oleh pemerintah membuat daya juang untuk bersaing masih belum optimal.

- **Gambaran Peta Proses Bisnis Pendukung Capaian Kinerja Utama**

Berikut ini adalah peta proses bisnis dalam pencapaian kinerja sasaran ketiga :

Peta Proses Bisnis Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri

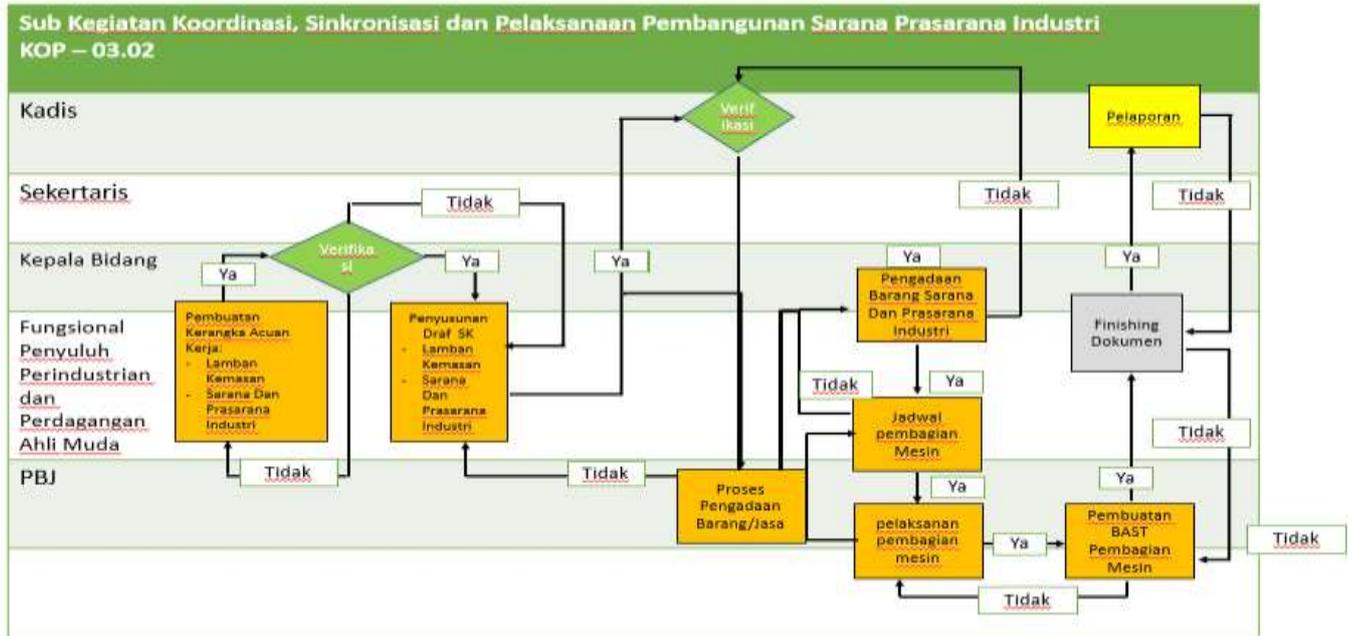


Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, pihak eksternal yang menunjang kegiatan pembinaan IKM dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Barat adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang merupakan mitra Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat dalam merencanakan, mengevaluasi dan mengembangkan IKM sesuai Dokumen RPKI Lampung Barat

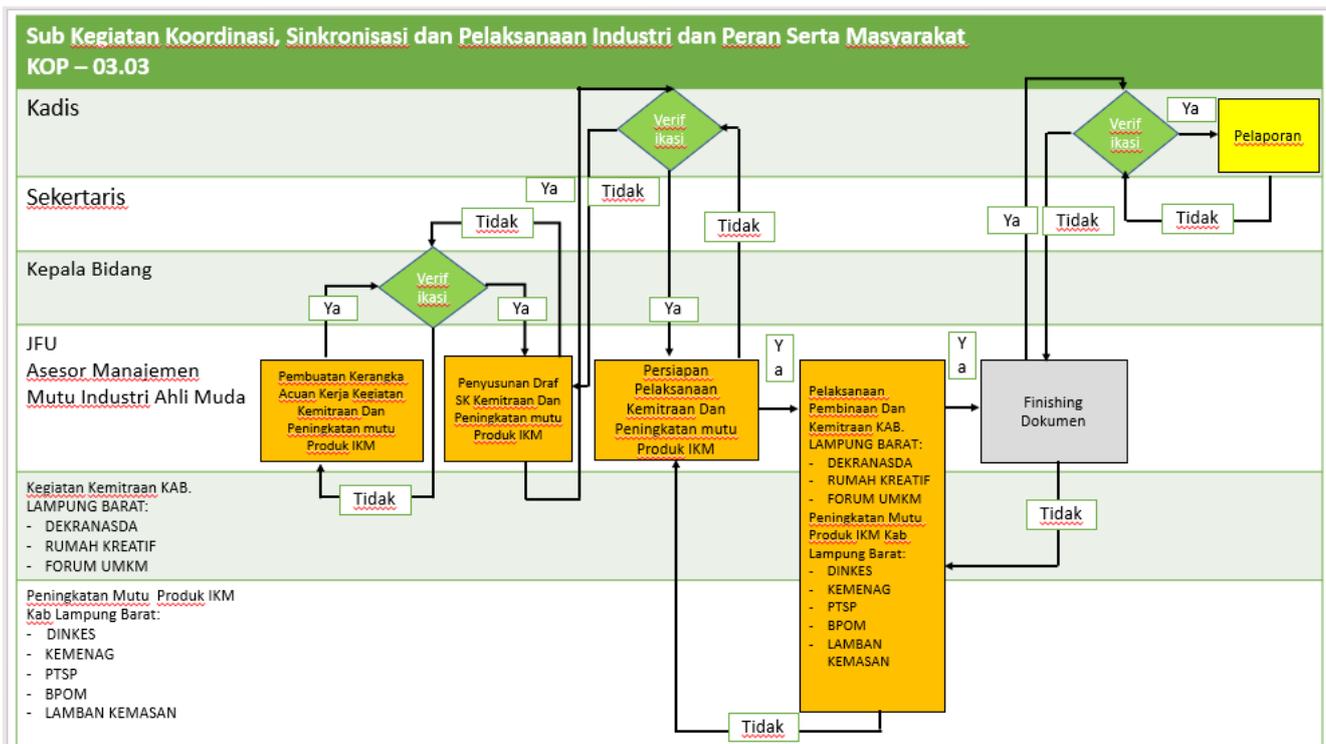
Selanjutnya adalah proses bisnis Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, dimana kegiatan ini adalah sebuah upaya pemerintah dalam memberikan bantuan alat produksi kepada Sentra IKM maupun IKM diluar sentra di Kabupaten Lampung Barat, yang dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta menstimulus berdirinya IKM baru disekitar wilayah sentra IKM.

Beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini antara lain Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk kepentingan pengadaan berbasis elektronik, pihak ketiga penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan. Secara ringkas dapat dilihat dalam bagan proses bisnis berikut ini

Peta Proses Bisnis Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri



Peta Proses Bisnis Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Industri dan Peran Serta Masyarakat



Pada peta proses bisnis diatas, banyak sekali pihak eksternal yang terlibat, yaitu :

- a. Dewan Kerajinan Daerah Lampung Barat, berperan sebagai mitra dalam pembinaan dan pengembangan IKM kerajinan khas daerah, melalui pengembangan inovasi produk maupun fasilitasi keikutsertaan dalam pameran baik didalam maupun diluar daerah
- b. Rumah Kreatif : berperan sebagai mitra dalam pembinaan IKM dan pengembangan pemasaran berbasis digital
- c. Forum UMKM : merupakan mitra pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada UMKM secara umum
- d. Lamban Kemasan : Menyediakan Layanan Desain dan Pencetakan logo dan kemasan produk IKM
- e. Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, BPOM, Dinas PTSP : mitra dalam pelaksanaan fasilitasi perijinan dan sertifikasi produk IKM

B. Perbandingan Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 4.6 Perbandingan Kinerja sasaran 1 dengan capaian kinerja tingkat provinsi

No	Target Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi Provinsi
1.	% Koperasi yang Sehat	33%	13%
2.	Persentase Peningkatan Jumlah UMKM	29.03%	19.40%
3	% Produk UMKM yang memenuhi standarisasi	3%	-

Sumber : Dinas Koperasi UKM Provinsi Lampung ; 2023

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa target kinerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023 secara umum selaras dengan target kinerja Dinas Koperasi UKM Provinsi Lampung, meski ada satu sasaran yang berbeda. Pada sasaran kedua terdapat perbedaan indikator namun secara substantif masih bisa diukur dan menjadi data pembanding bagi Kabupaten Lampung Barat. Secara umum realisasi kinerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat masih melampaui kinerja Dinas Koperasi UKM Provinsi Lampung. Selanjutnya untuk tingkat nasional tidak terdapat data pembanding dengan indikator yang sama.

Selanjutnya untuk sasaran meningkatnya PDRB sektor perdagangan dan sektor Perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.7 Perbandingan Kinerja 2 dan 3 dengan capaian kinerja provinsi dan nasional

No	Target Kinerja	Realisasi 2023	Kinerja Provinsi	Kinerja Nasional
1.	PDRB Sektor Perdagangan	1.200,87	10.953,62	19,588,445.60
2.	PDRB Sektor Industri	413.49	76.811.30	3.228.155,20

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja PDRB sektor perdagangan maupun industri masih jauh berada dibawah capaian Provinsi maupun capaian Nasional. Hal ini sangat wajar, mengingat Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah pertanian dimana 49% lebih PDRB nya bersumber dari sektor pertanian.

C. Realisasi Anggaran

Dalam menjalankan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja, Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 18.424.991.230 dimana anggaran tersebut terdiri dari urusan penunjang dan juga anggaran untuk membiayai urusan wajib koperasi UKM dan urusan pilihan Perdagangan dan Perindustrian. Secara ringkas dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.8 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dinas Koperindag tahun 2023

NO	PROGRAM	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI	KATEGORI
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip OPD : 77,92	Nilai Sakip OPD : 81,96 (105%)	96.45%	1.08	Efisien

2	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	% koperasi yang menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan usahanya (2%)	% koperasi yang menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan usahanya (2%)	100%	1	Efisien
3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang memiliki peningkatan SHU mencapai 5% (9%)	Persentase koperasi yang memiliki peningkatan SHU mencapai 5% (9.6%)	100%	1.92	Efisien
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM terfasilitasi (3%)	Persentase UMKM terfasilitasi (7.4%)	100%	2.4	efisien
5.	Program Pengembangan UMKM	Persentase wirausaha pemula (0.75%)	Persentase wirausaha pemula (0.21%)	99.14%	0.28	Tidak efisien
6.	Program Peningkatan Sarana	Persentase los, kios dan ruko	Persentase los, kios dan ruko yang	99.64%	1.1	Efisien

	Distribusi Perdagangan	yang direvitalisasi (10%)	direvitalisasi (10%)			
7.	Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	% rata – rata harga bahan kebutuhab pokok dan barang penting (3%)	% rata – rata harga bahan kebutuhab pokok dan barang penting (0.14%)	99.60%	1.01	Efisien
8.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	% Alat UTTP Tertera sah (3,99%)	% Alat UTTP Tertera sah (8%)	99.12%	2.02	Efisien
9.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentas e Produk Koperasi dan UMKM terfasilitasi penjualannya (4.40%)	Persentase Produk Koperasi dan UMKM terfasilitasi penjualannya (10.09%)	99.38%	2.3	Efisien
10.	Program Pengembangan Industri Kecil	Persentas e Pertumbu han IKM	Persentase Pertumbu han IKM Lampung			

	dan Menengah (IKM)	Lampung Barat (4%)	Barat (13.4%)			
		Persentase IKM yang memiliki kenaikan omset 10% pertahun (2%)	Persentase IKM yang memiliki kenaikan omset 10% pertahun (2%)	97%	3.45	efisien

Tabel diatas adalah metode yang digunakan untuk menghitung tingkat efisiensi sebuah program. Formulasi yang digunakan adalah dengan membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran, dengan ketentuan apabila tingkat efisien < 1 maka terkategori tidak efisien, dan jika tingkat efisiensi ≥ 1 terkategori efisien (Wahyudi, agus ; 2023)

Selanjutnya secara kuantitas, alokasi anggaran terbesar terserap pada urusan wajib bukan pelayanan dasar sebesar Rp. 11.091.815.280,- diikuti oleh urusan pilihan bidang Perindustrian sebesar Rp. 6.837.791.450 dan urusan pilihan perdagangan sebesar Rp. 495.384.500.

D. Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja yang disusun dimanfaatkan untuk hal – hal sebagai berikut :

1. Sebagai dasar penyusunan capaian kinerja Perangkat Daerah maupun penilaian kinerja individu
2. Sebagai dasar kebijakan dalam penyusunan perencanaan selanjutnya
3. Secara berkala digunakan sebagai rujukan pimpinan unit kerja dalam mengevaluasi kinerja pegawai

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sasaran kinerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat telah tercapai sesuai target bahkan ada beberapa sasaran yang mencapai kinerja diatas target yang ditetapkan
2. Pencapaian sasaran kinerja program telah tercapai dengan tingkat efisiensi rata – rata efisien. Hanya ada satu target program yang belum tercapai maksimal, yakni persentase wirausaha pemula yang ditargetkan 0.75% hanya tercapai 0.21 persen saja, hal ini dikarenakan program yang digulirkan adalah pelaksanaan Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu, yang pelaksanaan pembangunannya dilaksanakan di tahun 2023, sementara kegiatan inkubasi belum terlaksana optimal masih menggunakan klinik UMKM yang sederhana dan belum terprogram secara profesional sebagaimana layaknya sebuah layanan inkubator bisnis.
3. Pencapaian target kinerja kegiatan telah tercapai rata – rata 100%, kecuali kegiatan yang bersifat penunjang operasional kantor seperti biaya langganan Listrik, telepon, internet dan air bersih.
4. Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2023 mengalami berbagai dinamika. Ada faktor yang mendukung namun ada faktor yang menghambat pencapaian kinerja. Faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain dukungan regulasi, dukungan sumberdaya anggaran, perbaikan manajemen kinerja internal yang membuat garis koordinasi semakin efektif, hingga komitmen pimpinan perangkat daerah dalam memimpin dan membimbing tim sehingga bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai target kinerja yang diperjanjikan

Akan tetapi diatas faktor pendukung keberhasilan kinerja diatas, terdapat juga faktor penghambat atau tantangan dalam mencapai kinerja, baik internal maupun eksternal. Faktor internal antara lain beberapa aparatur

yang cukup mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi dalam organisasi maupun keterbatasan sarana dan prasarana. Sedangkan faktor eksternal adalah sikap mental koperasi dan UKM yang belum terbuka dengan perubahan kondisi era digital, ketergantungan pada bantuan pemerintah yang masih tinggi hingga komitmen melaksanakan hasil pembinaan yang masih rendah.

B. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan

1. Terjadi kesalahan dalam Proses pengadaan barang/jasa yang menggunakan e katalog terkadang membuat proses pengadaan memakan waktu yang cukup lama
2. Pergantian PPK dalam Program Pengembangan UMKM dikarenakan PPK menjalankan ibadah haji, sehingga memakan waktu yang cukup untuk melakukan pergantian PPK dalam aplikasi pengadaan barang/jasa secara daring
3. Evaluasi kinerja melalui aplikasi sakti berkibar mengalami trouble.

C. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

1. Telah dilakukan langkah – langkah perbaikan dalam pelaksanaan pengadaan dengan berkoordinasi dengan pejabat pengadaan dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa
2. Pergantian PPK segera dikoordinasikan dengan pihak terkait untuk melakukan perubahan data pada sistem
3. Berkoordinasi dengan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam operasional aplikasi sakti berkibar.